

Aset Pemkot Jadi Temuan BPK

Palu, Mercusuar – Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kembali melakukan penertiban aset. Langkah ini dilakukan menyusul temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sulteng terhadap Pemkot dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kota Palu tahun 2013. Kepala Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Aset Setda DPPKAD Palu Wawan Hemawan mengatakan inventarisasi dilakukan secara terperinci berdasarkan sumber penadanaan, terutama SKPD yang memiliki unit-unit kerja di bawahnya, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Palu sejumlah SKPD yang memiliki unit di bawahnya, seperti sekolah dan puskesmas, dalam pencatatan inventarisnya banyak tidak terjadi kecocokan antara data dengan barang yang ada, Pasalnya, aset barang elektronik yang belum dilakukan penyerahan dengan menggunakan sumber dana APBN bersama dana APBD maupun hibah langsung disatukan pencatatannya. “Seharusnya tunggu penyerahan dulu baru dicantumkan dalam inventarisasi aset. Karena keterbatasan waktu makanya kemarin dinas tidak sempat menyajikan data pada pemeriksa BPK,”Papar Wawan, Senin (2/6/2014). Agar kasus serupa tidak berulang, pihaknya akan mendampingi dinas terkait melakukan pendataan dan melakukan pemisahan aset barang elektronik sesuai sumber pendataan barang, seperti yang menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Dana Alokasi Khusus (DAK). Masalah aset daerah sebelumnya menjadi persoalan dalam pemeriksaan BPK Perwakilan Sulteng. Aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 disajikan sebesar Rp222,19 miliar. Namun nilai tersebut tidak dapat dilakukan pengujian karena kelemahan pencatatan dalam ventaris barang dan buku inventaris. Akibatnya, BPK tidak dapat melaksanakan prosedur pemeriksaan secara memadai untuk memperoleh keyakinan mengenai penyajian saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2013.

Sumber : Mercusuar, Selasa, 3Juni 2014, Halaman 05, Kolom 01- 08

Catatan :

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Aset tetap terdiri dari:
 1. Tanah;
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan mesin;
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Gedung dan bangunan;
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Jalan, irigasi, dan jaringan;
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Aset tetap lainnya; dan
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Konstruksi dalam pengerjaan.
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.